

ECONOMIE

Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

Gagarin Putra^{1*}, Pratiwi Dwi Karijati²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Abstrak

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran/terpenci, pemerintah mewujudkan adanya Dana Desa yang ditujukan untuk mendorong pembangunan Desa dengan memberikan bantuan dana dari APBN. Akan tetapi pada saat ini, masih rendahnya pemahaman para perangkat Desa atas administrasi dan pertanggung jawaban penggunaan dana Desa menjadi permasalahan dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini berbentuk analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan dan melakukan observasi. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara dan lembar observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) beberapa kegiatan yang telah terealisasi seperti perbaikan jalan dengan pembangunan paving, perbaikan gorong-gorong; (2) SDM dalam pengelolaan dana desa memenuhi secara kuantitas, namun dari segi kualitas masih diperlukan pembinaan; (3) dana desa belum optimal membantu permasalahan ekonomi karena lebih cenderung memenuhi pembangunan infrastruktur; (4) penyaluran dana desa sudah dibagi secara adil dan merata dengan memprioritaskan desa yang membutuhkan; (5) masyarakat sangat antusias dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan dana desa khususnya dalam membantu pelaksanaan pembangunan infrastruktur; (6) dana desa yang disalurkan sangat bermanfaat dan membantu masyarakat khususnya bagi pembangunan infrastruktur.

Kata kunci: *Evaluasi, Pengelolaan Dana Desa*

Abstract

Improving the welfare of the people who live in residential areas / hated, the government embodies the Village Fund which encourages the development of the Village to provide funding from the National Budget. However, at the moment, there is still a lack of understanding of the Village officials on the administration and accountability of Village fund users which is a problem in effective and efficient village fund management. This study was designed to describe the evaluation of village fund management in Putren Village, Sukomoro District, Nganjuk Regency. This research is a qualitative descriptive analysis. Data used is sourced from primary data obtained by conducting interviews with several informants and making observations. The instruments used in this study were interview guides and observation sheets. The data analysis technique used is qualitative analysis with interactive models. The results in this study indicate that: (1) several activities have been realized such as road repairs with the construction of paving, repair of culverts; (2) HR in managing village funds meets the requirements, but in terms of quality guidance is still needed; (3) village funds have not been optimal in helping economic problems because they require infrastructure development assistance;

***Corresponding author:** gagarin12putra@gmail.com

ECONOMIE

(4) distribution of village funds has been evenly distributed and evenly distributed by prioritizing villages in need; (5) the community is very enthusiastic in participating in the management of village funds specifically in assisting the implementation of infrastructure development; (6) village funds that are channeled are very beneficial and beneficial to the community for infrastructure development.

Keywords: *Evaluation, Village Fund Management*

Pendahuluan

Daerah merupakan salah satu pembeda antara era reformasi dengan era orde baru. Pada era orde baru pembangunan dan perkembangan ekonomi lebih terpusatkan di ibu kota Negara Indonesia, Jakarta, sedangkan pada era reformasi saat ini, pembangunan dan perkembangan ekonomi mulai tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Pemerintah daerah telah diberikan kewajiban, hak, dan wewenang oleh pemerintah pusat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya yang bertujuan agar daerah bisa membangun desa jauh lebih baik dengan sesuai, yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pasal 1 angka 5.

Meskipun proses pemerataan pembangunan dan pembangunan ekonomi telah berlangsung hampir 20 tahun, namun masih terjadi ketimpangan tingkat Pemerintahan Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), dimana pembangunan masih dititik beratkan di daerah kota atau daerah yang berpopulasi sangat tinggi tingkat penduduknya. Hal tersebut menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di daerah terpencil semakin meningkat, yang kemudian mendorong penduduk di daerah terpencil untuk melakukan urbanisasi demi memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik sehingga dengan melakukan urbanisasi ke kota lain mereka bisa mendapatkan pendapatan yang tinggi akan tetapi mereka belum mengerti kalau berdampak resiko yang sangat tinggi. Urbanisasi yang pada umumnya dilakukan oleh penduduk usia produktif yang menyebabkan pembangunan dan perkembangan ekonomi di daerah pinggiran/terpencil. Namun seiring dengan tingginya persaingan dalam lapangan pekerjaan di kota-kota besar, dan banyaknya jumlah pelaku urbanisasi yang tidak dibekali dengan latar belakang pendidikan atau *skill* yang memadai menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, yang kemudian menjadi pendorong beberapa masalah di kota-kota besar seperti tingkat kejahatan, pemukiman kumuh, pengemis, dan lain-lain.

Desa sebagai tumpuan dari pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga dalam pengelolaan pemerintah Desa diperlukan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Dengan nilai Dana Desa yang jumlahnya cukup signifikan sangat rawan akan penyelewengan, maka dengan pengelolaan yang baik diharapkan tujuan dari adanya Dana Desa dapat tercapai. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

ECONOMIE

Bagaimana evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk?

Tinjauan Pustaka

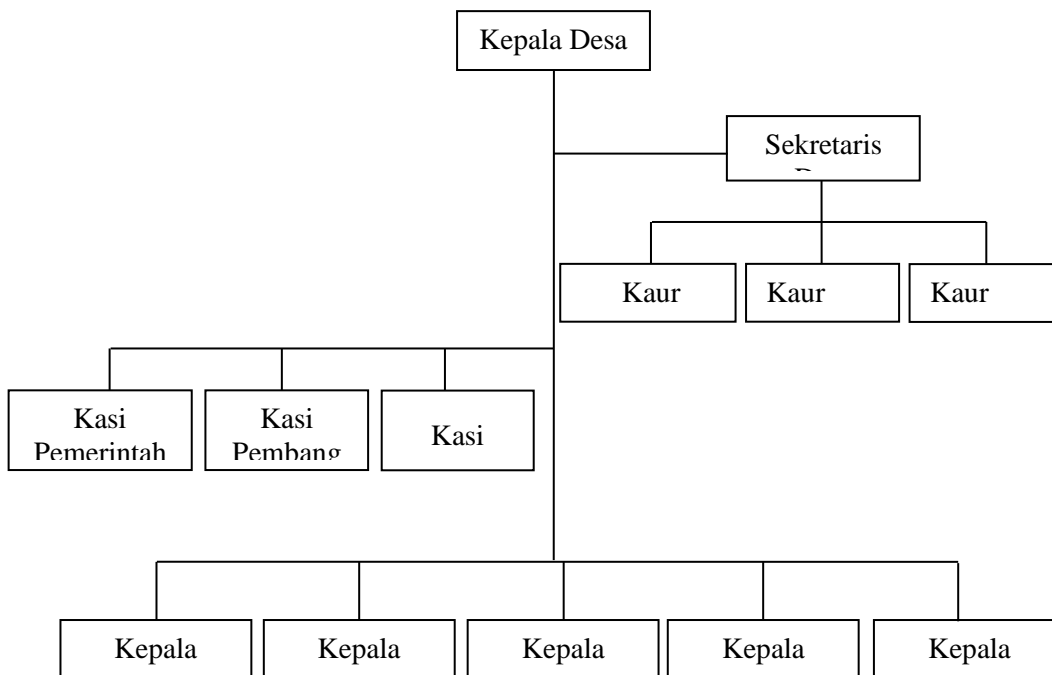
Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan” tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan. Jones dalam Ekowati (2012:111) mendefinisikan evaluasi sebagai berikut “*evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation*”, yang artinya evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya.

Pengertian Desa, Pemerintahan Desa, dan Administrasi Desa

KBBI mendefinisikan, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), dan juga mendefinisikan bahwa Desa merupakan kelompok di luar kota yang merupakan kesatuan. Sementara Soetardjo (Romantis, 2015), Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Dari definisi-definisi tersebut terdapat kesan bahwa Desa memiliki suatu tingkat kemandirian dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan dari definisi-definisi tersebut juga memberikan kesan bahwa Desa memiliki hubungan yang erat dengan masyarakatnya.

Pemerintah Desa didefinisikan sebagai Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan perangkat lainnya yang ditunjukkan pada struktur organisasi desa dibawah berikut:

ECONOMIE



Sumber: Peraturan Desa

Gambar 1. Struktur Organisasi Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1, Kepala Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sementara Pasal 26 ayat 4 menjelaskan tentang kewajiban dari Kepala Desa, yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika:
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa:
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa:
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan:
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender:
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme:
- g. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa:
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik:
- i. Mengelola keuangan dan asset Desa:
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa:
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa:

ECONOMIE

- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa:
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa:
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa:
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Sementara Sekretaris Desa merupakan perangkat Desa yang bertugas membantu kepala Desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa (Sujarweni, 2015:9). Sekretaris Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala Desa:
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa:
- c. Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin:
- e. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan kepada kepala Desa.

Dan dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya, Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Desa, yang terdiri atas:

1. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU), yang memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa, serta mempersiapkan bahan penyusunan APBD Desa dan laporan keuangan yang dibutuhkan Desa.
2. Kepala Urusan Trantib (KAUR TRANTIB), yang memiliki tugas untuk membantu kepala desa melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan perlindungan masyarakat.
3. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM), yang memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan Desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Selain itu, Kepala Desa juga dibantu dengan beberapa Kasi (Kepala Seksi) yang terdiri dari:

1. Kasi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dengan memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah:

- a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban.

ECONOMIE

- b. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

2. Kasi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di bidang pembangunan, perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Kasi Kesra

Kepala Seksi Kesejahteraan & Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dengan memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah:

- a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan.
- b. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
- d. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa (Sujarweni, 2015:13). Adapun jenis dan bentuk Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 adalah:

1. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan dan informasi mengenai kegiatan Pemerintah Desa pada Buku Administrasi Umum yang terdiri atas:
 - a. Buku Data Peraturan Desa.
 - b. Buku Data Keputusan Kepala Desa
 - c. Buku Data Investaris Desa.
 - d. Buku Data Aparat Pemerintah Desa.
 - e. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa.
 - f. Buku Data Tanah di Desa.
 - g. Buku Agenda.
 - h. Buku Ekspedisi.
2. Administrasi Penduduk, yang merupakan kegiatan pencatatan data dari informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk di dalam Buku Administrasi Penduduk, yang terdiri dari:

ECONOMIE

- a. Buku Data Induk Penduduk Desa.
 - b. Buku Data Mutasi Penduduk Desa.
 - c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan.
 - d. Buku Data Penduduk Sementara.
3. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan, yang terdiri atas:
- a. Buku Anggaran.
 - b. Buku Kas Umum.
 - c. Buku Kas Harian Pembantu.
 - d. Buku Kas Pembantu Pajak.
 - e. Buku Kas Pembantu Bank.
4. Administrasi Pembangunan, yang merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan, yang terdiri dari:
- a. Buku Rencana Pembangunan.
 - b. Buku Kegiatan Pembangunan.
 - c. Buku Inventaris Proyek.
 - d. Buku Kader-Kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat.
5. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD, yaitu:
- a. Buku Data Anggota BPD.
 - b. Buku Data Keputusan BPD.
 - c. Buku Data Kegiatan BPD.
 - d. Buku Agenda BPD.
 - e. Buku Ekspedisi BPD.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:14) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif merupakan suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris (Moleong, 2013:8).

Informan Penelitian

ECONOMIE

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2016:222). Adapun yang menjadi responden untuk diwawancarai adalah:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Ketua Tim Pelaksana Pembangunan
4. Masyarakat

Instrumen Penelitian

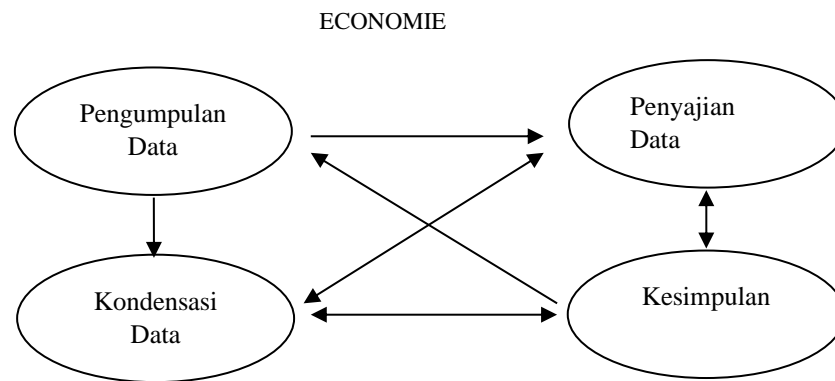
Menurut Arikunto (2014) instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri dengan dibantu instrumen lain yaitu pedoman wawancara, observasi. Instrumen penelitian dimaksudkan sebagai alat pengumpul data (Moleong, 2013). Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara. Panduan wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai evaluasi yang mencakup:

- a. Efektifitas (*effectiveness*) pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.
- b. Efisiensi (*efficiency*) pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.
- c. Kecukupan (*adequacy*) pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.
- d. Perataan (*equity*) pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.
- e. Responsivitas (*responsiveness*) pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.
- f. Ketepatan (*appropriateness*) pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan cara mengidentifikasi dan menganalisis data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi dana desa.

Menurut Miles *et al* (2014) analisis data dapat mengikuti 3 alur secara bersamaan seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Miles *et al* (2014)

Gambar 2. Komponen Analisis Data Model Interaktif

1. Kondensasi Data

Data kondensasi mengacu pada proses pemilihan, fokus, menyederhanakan, abstrak, dan / atau mengubah data yang muncul dalam penuh dari catatan yang ditulis pada lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya.

2. Display Data

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan batas waktu yang diperlukan untuk dipenuhi.

Hasil dan Pembahasan

Efektifitas (*effectiveness*)

Berdasarkan hasil penelitian Efektifitas dibawah ini adalah :

1. Pengelolaan dana desa telah mencapai target yang diharapkan terlihat dari beberapa kegiatan yang telah terealisasi seperti perbaikan jalan dengan pembangunan paving, perbaikan gorong-gorong

ECONOMIE

2. Perencanaan pengelolaan dana desa untuk melanjutkan pembangunan yang belum tercapai sudah dilakukan dengan baik melalui musyawarah dusun atau rapat musdus
3. Sejauh ini pengelolaan dana desa tidak menemui adanya masalah yang menjadi hambatan. Hanya saja terkadang dana yang dicairkan sedikit terlambat sehingga pelaksanaannya juga menjadi terhambat

Efisiensi (*efficiency*)

Berdasarkan hasil penelitian Efisiensi dibawah ini adalah :

1. Sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa sudah cukup terpenuhi dari segi kuantitas. Namun dalam hal kualitas masih diperlukan pembinaan untuk pengelolaan dana desa.
2. Proses pengelolaan dana sesuai dengan mekanisme penganggaran dana desa.
3. Proses pencairan dana desa juga dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah yang sudah ditetapkan

Kecukupan (*adequancy*)

Berdasarkan hasil penelitian kecukupan dibawah ini adalah :

1. Kebijakan dari penyaluran dana desa sejauh ini belum sepenuhnya membantu permasalahan ekonomi, karena penyaluran dana lebih cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, namun masih kurang dalam membantu mengatasi masalah perekonomian terbukti dari masih banyaknya pengangguran di desa tersebut.
2. Laporan dari pengelolaan dana desa sangat memuaskan, karena pengelolaan dana desa sudah sangat bertanggung jawab kepada masyarakat terlihat dari adanya transparansi dana desa dalam setiap perencanaan dana desa yang dilakukan melalui pengadaan rapat atau musyawarah desa. Menurut Lindstedt dan Naurin dalam penelitiannya Bararoh dan Prayitno (2011) menjelaskan dalam kerangka pemikiran principal-agent theory, transparansi merupakan salah satu jalan bagi principal untuk mengontrol kinerja dari agent. Perlunya mekanisme control dalam hubungan antara principal dan agent disebabkan adanya kecenderungan agent bertindak menyimpang dari kesepakatan yang telah dibuat dengan principal disebabkan asimetri informasi diantara keduanya.

Perataan (*equity*)

Berdasarkan hasil penelitian kecukupan dibawah ini adalah :

1. Penyaluran dana desa sudah dibagi secara adil dan merata sesuai dengan penganggaran yang disesuaikan peraturan pemerintah
2. Pembagian dana desa sudah dilakukan secara adil dan merata dengan memprioritaskan dusun yang lebih membutuhkan bantuan dana untuk pembangunan seperti pemavingan dan pemasangan gorong-gorong/ *box culvert*

ECONOMIE

Responsivitas (*responsiveness*)

Berdasarkan hasil penelitian kecukupan dibawah ini adalah :

1. Masyarakat sangat antusias dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan dana desa khususnya dalam membantu pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti pemavingan jalan
2. Masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang aktif berpartisipasi dalam musyawarah desa, sehingga masyarakat kurang mengetahui proses pengelolaan dana desa secara detail

Ketepatan (*appropriateness*)

Berdasarkan hasil penelitian ketepatan dibawah ini adalah :

1. Dana desa yang disalurkan sangat bermanfaat dan membantu masyarakat khususnya bagi pembangunan infrastruktur terutama pembangunan jalan dengan paving

Kesimpulan

Eektifitas pencapaian target pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah mengalami pencapaian sesuai target yang diharapkan. Efisiensi ditinjau dari usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa memenuhi secara kuantitas, namun dari segi kualitas masih diperlukan pembinaan untuk pengelolaan dana desa. Kecukupan ditinjau melalui kemampuan dana desa yang disalurkan dalam membantu permasalahan perekonomian menunjukkan bahwa kebijakan dari penyaluran dana desa sejauh ini belum optimal membantu permasalahan ekonomi di Desa Putren, karena lebih cenderung memenuhi pembangunan insfrastruktur seperti pembangunan jalan pemavingan dan gorong-gorong. Perataan ditinjau melalui bagaimana dana desa didistribusikan dapat diketahui bahwa penyaluran dana desa sudah dibagi secara adil dan merata sesuai dengan penganggaran yang disesuaikan peraturan pemerintah serta memprioritaskan dusun yang lebih membutuhkan bantuan dana desa.

Responsivitas dari partisipasi dan peran masyarakat terhadap pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan dana desa dalam membantu pelaksanaan pembangunan infrastruktur, namun masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang aktif dalam musyawarah desa, sehingga masyarakat kurang mengetahui proses pengelolaan dana desa secara detail. Ketepatan ditinjau dari apakah pembangunan yang diberikan memberikan manfaat bagi masyarakat menunjukkan bahwa dana desa yang disalurkan sangat bermanfaat dan membantu masyarakat khususnya bagi pembangunan infrastruktur terutama pembangunan jalan dengan paving.

ECONOMIE

Adapun saran–saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar aparat Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dapat membangun komunikasi yang bersinergi dengan pemerintah dalam pengelolaan dana desa serta meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pengelolaan dana desa di Desa Putren menjadi efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan melalui muasawarah bersama atau rapat musdus.
2. Diharapkan agar Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dapat meningkatkan kemampuan para sumber daya manusia agar dapat melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan.
3. Diharapkan agar Kepala Desa di Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dapat lebih aktif dalam melakukan pengawasan dana desa khususnya pembangunan yang disesuaikan dengan prioritas desa yang lebih membutuhkan. Selain itu diharapkan agar dapat lebih meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa.
4. Diharapkan agar Kepala Desa di Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dapat melakukan survei terlebih dahulu pada desa-desa mana yang lebih membutuhkan bantuan terlebih dahulu. Dalam hal ini dapat selalu aktif meninjau desa-desa yang ada.
5. Diharapkan agar Kepala Desa di Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dapat lebih mendorong masyarakat untuk ikut aktif dan berpartisipasi dalam musyawarah desa serta pelaksanaan pembangunan yang ada melalui sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat ketika rapat musdus.
6. Diharapkan agar Kepala Desa di Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dapat terus melakukan evaluasi terhadap penyaluran dana desa agar dapat lebih efektif dan efisien serta melakukan pengawasan pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa agar dapat lebih bermanfaat.
7. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan hasil dalam penelitian ini dengan mengambil obyek di desa lain agar diperoleh hasil yang lebih variatif.

Daftar Pustaka

- Badjuri, A. dan Yuwono, T. (2002), *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bararoh, T dan Prayitno, B. (2011). Analisis Faktor Transparansi Pemerintah dan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Mempengaruhi Kotupsi di Kabupaten dan Kotamadya di Indonesia. *Jurnal Equilibrium* Vol. 9 (2), 160-180
- Dunn, W N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

ECONOMIE

- Ekowati, M. R. L. (2012). *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program* (Edisi Revisi), Bandung: PT Rosdakarya.
- Kuncoro, M. (2011). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: YKPN.
- Mardikanto, T., dan Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A Methods Sourcebook*. New York: SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1 Keuangan Desa
- Romantis, P A. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*, (Skripsi, Universitas Jember).
- Saludung, J. (2009). Hasil Evaluasi Implementasi Program Pembinaan Industri Kecil Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Tana Toraja Program Implementation Evaluation Result of Small Industry Development Of Food And Beverage In Tana Toraja. *Jurnal Dedikasi*. XI (22), 11-25.
- Steviarini, Rr. D. (2008). Evaluasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kemitraan Usaha Ternak Di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. (Tesis, Universitas Sebelas Maret).
- Subarsono, (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudjana, N. (2006). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa (DD)
- UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah